Katalog BPS: 9302023.1673

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA PAGARALAM

Menurut Pengeluaran

2017-2021

https://pagaralamkota.bps.go.id

Badan Pusat Statistik
Kota Pagar Alam

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KOTA PAGAR ALAM

Menurut Pengeluaran

2017-2021

https://pagaralamkota.bps.go.id

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KOTA PAGAR ALAM
MENURUT PENGELUARAN 2017-2021

ISSN : 2598-555002
Nomor Publikasi : 16735.2203
Katalog BPS : 9302002.1673

Ukuran Buku : 21 cm x 29,7 cm
Jumlah Halaman : vii + 65 halaman

Naskah:
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Kota Pagar Alam

Gambar Kulit:
Subdirektorat Konsolidasi Neraca Pengeluaran, BPS RI

Diterbitkan Oleh:
Badan Pusat Statistik Kota Pagar Alam

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

https://pagaralamkota.bps.go.id

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KOTA PAGAR ALAM
MENURUT PENGELUARAN 2017-2021

Anggota Tim Penyusun:

Pengarah : Dedi Fahlevi, M.Si

Editor : Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Kota Pagar Alam

Penulis : Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Kota Pagar Alam

https://pagaralamkota.bps.go.id

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Menurut teori ekonomi makro, penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut Lapangan Usaha/*industry*), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDB menurut Pengeluaran /*expenditure*) serta pendekatan pendapatan (PDB menurut pendapatan/*income*). Ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDB yang sama.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), danEkspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya mengunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kepada seluruh anggota Tim Penyusun Publikasi ini yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Terakhir, disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya.

Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

PagarAlam, April 2022

Kepala Badan Pusat Statistik
Kota PagarAlam,

Dedi Fahlevi, M.Si

https://pagaralamkota.bps.go.id

DAFTAR ISI

		Halaman
Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Daftar Tabel		iv
Daftar Grafik		vi
Daftar Lampiran		vii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	2
	1.2. Kegunaan Statistik PDRB	3
BAB II	METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA	5
	2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga	6
	2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT	9
	2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah	12
	2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	14
	2.5 Perubahan Inventori	19
	2.6 Ekspor dan Impor	23
BAB III	TINJAUAN PEREKONOMIAN KOTA PAGAR ALAM BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN TAHUN 2017-2021	25
	3.1 Tinjauan Agregat PDRB Kota Pagar Alam Menurut Pengeluaran	26
	3.2 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga	31
	3.3 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT	36
	3.4 Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah	37
	3.5 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	39
	3.6 Perkembangan Perubahan Inventori	41
	3.7 Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa	42
	3.8 Perkembangan Impor Barang dan Jasa	43

https://pagaralamkota.bps.go.id

BAB IV PERKEMBANGAN AGREGAT PRDB MENURUT PENGELUARAN KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2017-2021 45
4.1 PDRB (Nominal) 46
4.2 Perbandingan Penggunaan PDRB untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor 47
4.3 Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 48
4.4 Perbandingan Konsumsi Akhir terhadap PDRB 49
4.5 Perbandingan Ekspor terhadap PMTB 50
4.6 Perbandingan PDRB terhadap Impor 51
4.7 Keseimbangan Total Penyediaan dan Total Permintaan 51
4.8 Neraca Perdagangan (*Trade Balance*) 52

BAB V PENUTUP 54

LAMPIRAN 56

DAFTAR PUSTAKA 63

https://pagaralamk.bps.go.id

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Pagar Alam Tahun 2017-2021 26

Tabel 2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Pagar Alam Tahun 2017-2021 27

Tabel 3 Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, Kota Pagar Alam Tahun 2017-2021 29

Tabel 4 Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Pagar Alam Tahun 2017-2021 30

Tabel 5 Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kota Pagar Alam, Tahun 2017-2021 31

Tabel 6 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Pagar Alam, Tahun 2017-2021 32

Tabel 7 Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Pagar Alam, Tahun 2017-2021 33

Tabel 8 Pertumbuhan Riil Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Pagar Alam, Tahun 2017-2021 34

Tabel 9 Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Pagar Alam, Tahun 2017-2021 35

Tabel 10 Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT Kota Pagar Alam, Tahun 2017-2021 36

Tabel 11 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kota Pagar Alam, Tahun 2017-2021 38

Tabel 12 Perkembangan dan Struktur PMTB Kota Pagar Alam, Tahun 2017-2021 40

Tabel 13 Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kota Pagar Alam, Tahun 2017-2021 41

Tabel 14 Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Kota Pagar Alam, Tahun 2017-2021 ... 42

https://pagaralamkotabps.go.id

Tabel 15	Perkembangan Impor Barang dan Jasa Kota Pagar Alam, Tahun 2017-2021	44
Tabel 16	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kota Pagar Alam, Tahun 2017-2021	46
Tabel 17	Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor Tahun 2017-2021	47
Tabel 18	Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Tahun 2017-2021	48
Tabel 19	Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kota Pagar Alam, Tahun 2017-2021	49
Tabel 20	Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB) Tahun 2017-2021	50
Tabel 21	Rasio PDRB terhadap Impor Kota Pagar Alam Tahun 2017-2021.....	51
Tabel 22	Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Kota Pagar Alam, Tahun 2017-2021	52
Tabel 23	Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Kota Pagar Alam Tahun 2017-2021.....	53

https://pagaralamkota.bps.go.id

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 1 Perbandingan PDRB adh Berlaku dan adh Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Pagar Alam, Tahun 2017-2021 28

https://pagaralamkota.bps.go.id

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Pagar Alam 2017-2021……..... 57

Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran, Kota Pagar Alam 2017-2021……..... 58

Lampiran 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Pagar Alam 2017-2021 …… 59

Lampiran 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Pagar Alam 2017-2021…….. 60

Lampiran 5. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010 = 100) Menurut Pengeluaran, Kota Pagar Alam 2017-2021……..……..... 61

Lampiran 6. Laju Pertumbuhan Indeks Implisit Produk Domestik Menurut Pengeluaran, Kota Pagar Alam 2017-2021 62

https://pagaralamkota.bps.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

https://pagaralamkota.bps.go.id

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu Negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ketahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 dan ini tentu akan mencerminkan struktur ekonomi terkini.

https://pagaralamkota.bps.go.id

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

a. Menurut Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu Negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Penggalian, 3. Industri Pengolahan, 4. Pengadaan Listrik dan Gas, 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6. Konstruksi, 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8. Transportasi dan Pergudangan, 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 10. Informasi dan Komunikasi, 11. Jasa Keuangan dan Asuransi, 12. Real Estate, 13.Jasa Perusahaan, 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 15. Jasa Pendidikan, 16.

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 17. Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

b. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu Negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak lainnya atas produksi neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

c. Menurut Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (4) pembentukan modal tetap bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

https://pagaralamkota.bps.go.id

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak lainnya atas produksi neto.

1.2 KEGUNAAN STATISTIK PDRB

Data PDRB adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian regional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.

2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap lapangan usaha dari tahun ketahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap lapangan usaha dalam suatu negara. Lapangan usaha yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu negara.
4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa yang digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan luar negeri.
7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

https://pagaralamkota.bps.go.id

BAB II

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

https://pagaralamkota.bps.go.id

2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

i. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumahtangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

ii. Konsep dan definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

https://pagaralamkota.bps.go.id

iii. Cakupan

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh penduduk suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (United Nations), yaitu sebagai berikut:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furnitur, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan

11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun karena keterbatasan data, maka 12 COICOP tersebut dikelompokkan kembali manjadi hanya 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

https://pagaralamkota.bps.go.id

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mencakup juga hal-hal sebagai berikut :

- Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (o*wner occupied dwellings*);

  Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).

- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen di luar wilayah atau di luar negeri (diperlakukan sebagai impor)

Terdapat beberapa catatan yang perlu dikatahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

- Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut)

- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
- Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.
- Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

iv. Penghitungan PKRT Tahunan

1. **Sumber data**

   Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah :

   - Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
   - Jumlah penduduk pertengahan tahun,
   - Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dan jenis pengeluaran tertentu,
   - Indeks Harga Konsumen (IHK).

2. **Metode penghitungan**

   Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Susenas. Akan tetapi, karena hasil estimasi data pengeluaran rumah tangga yang berasal dari Susenas cenderung *underestimate* (terutama untuk kelompok bukan makanan dan kelompok makanan jadi), maka perlu dilakukan penyesuaian (*adjustment)*. Dalam melakukan *adjustment*, digunakan data sekunder dalam bentuk data atau indikator *supply* dari berbagai sumber data di luar Susenas. Setelah diperoleh hasil *adjustment*, maka yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan pada data sekunder. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis

https://pagaralamkota.bps.go.id

pengeluaran tertentu. Hal ini dilakukan karena hasil penghitungan dari data sekunder dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan caramen-*deflate* PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya, langkah-langkah penghitungan PKRT dapat diringkas sbb:

1. Estimasi PKRT hasil Susenas:
   a. Makanan = pengeluaran konsumsi perkapita seminggu x (30/7) x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
   b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi perkapita sebulan x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
2. Data poin ke-1 dikelompokan menjadi 7 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas yang mungkin dikontrol secara tersendiri;
3. Terhadap data poin ke-2 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu;
4. Diperoleh nilai PKRTyang telah di-*adjust*;
5. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. PKRT ADHK 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke-4 dengan hasil poin ke-5.

https://pagaralamkota.bps.go.id

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

i. Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumahtangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii. Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

Karakteristik unit LNP adalah sbb:

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

https://pagaralamkota.bps.go.id

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari:

a. Konsumsi antara, contoh: pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
b. Kompensasi tenaga kerja, contoh: upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
c. Penyusutan
d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dan lain-lain.

iv. Penghitungan PK-LNPRT Tahunan

1. Sumber data

- Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SK-LNP).
  Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- Hasil *up-dating* direktori LNPRT.
  Informasi yang diperoleh dari hasil *up-dating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- Indeks Harga Konsumen (IHK)

2. Metode penghitungan

PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sebagai berikut :

- Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenis-nya dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

$\bar{x}_{ij}$: Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran
x_{ij} : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran
n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga
i : Jenis lembaga LNPRT, i = 1, 2, 3, …, 7
j : jenis pengeluaran LNPRT, j = 1, 2, 3, …, 19

- Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumussebagai berikut :

$$X = \sum_{i=1}^{7} \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

X : PK-LNPRT adh Berlaku

https://pagaralamkota.bps.go.id

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PK-LNPRTADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

i. Pendahuluan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang dan jasa maupun aktivitas investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sebagai berikut :

https://pagaralamkotabps.go.id

1. Memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dan sebagainya. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidentil dari fungsi pokok unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

iii. Cakupan

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Provinsi mencakup : a. PK-Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah provinsi; b. PK-Pemerintah Provinsi yang bersangkutan; c. PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah Provinsi; d. PK-Pemerintah Desa/ Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah Provinsi bersangkutan.

https://pagaralamkota.bps.go.id

iv. Penghitungan PDRB Tahunan

1. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Provinsi Tahunan adalah:

a. Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)
b. Data realisasi APBD Tahunan (Kemenkeu)
c. Statistik Keuangan Daerah (BPS)
d. Output Bank Indonesia (BI)
e. Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementrian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.

2. Metode Penghitungan

a. PK-P Provinsi atas dasar harga berlaku (ADHB)

Secara umum, PK-P ADHB dihitung menggunakan rumusan berikut:

PK-P ADHB=
Output non pasar–penjualan barangdan jasa + output Bank Indonesia

Output **non-pasar dihitung** dengan pendekatan biaya yg dikeluarkan, yaitu : Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level Provinsi, PK-P Provinsi ADHB, dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah Provinsi itu sendiri + pengeluaran akhir konsumsi pemerintah seluruh pemerintahan Kabupaten/ Kota yang ada di wilayah Provinsi tersebut + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada diwilayah provinsi tersebut + pengeluaran pemerintah pusat yang menjadi bagian dari Provinsi yang bersangkutan.

b. PK-P Provinsi atas dasar harga konstan (ADHK)

Pengeluaran konsumsi pemerintah ADHK dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

https://pagaralamkota.bps.go.id

2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

i. Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

ii. Konsep dan Definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

https://pagaralamkota.bps.go.id

iii. Cakupan

PMTB terdiri dari :

1. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagai-nya;
2. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya (seperti overhaul mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan,

pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

iv. Penghitungan PMTB Tahunan

1.Sumber data

a. Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Prov/Kab/Kota.
b. Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.
c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil & Rumah tangga (level provinsi).
d. Laporan keuangan perusahaan.
e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level provinsi.
f. IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas).
h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum.
i. Publikasi Statistik Konstruksi.
j. Data Eksplorasi Mineral dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.

2.Metode penghitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan "langsung" adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan "tidak langsung" adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan "arus komoditas". Dalam hal ini penyediaan atau "*supply*" dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

https://pagaralamkota.bps.go.id

Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (adh) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai adh berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB adh Konstan, maka PMTB adh Berlaku tersebut di "*deflate*" (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

https://pagaralamkotabps.go.id

Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik adh Berlaku maupun adh Konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasi output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB adh Berlaku. Untukmemperoleh nilai atas dasar harga konstan adalah dengan men-*deflate* PMTB (adh Berlaku) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan ke dua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara "ekstrapolasi" atau mengalikan PMTB adh Konstan dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB adh Konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB adh Berlaku, nilai PMTB adh Konstan tersebut di "*inflate*" (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB adh Konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara.

Pertama, PMTB adh Berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rician tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). *Kedua,* untuk memperoleh PMTB adh Konstan adalah dengan cara men"deflate" PMTB adh Berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB adh Berlaku untuk barang modal tak-berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan adh Berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB adhKonstan-nya diperoleh dengan men-deflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunan-nya.

Untuk perangkat lunak, PMTB adh Berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang *software*. Untuk adh Konstan diperoleh dengan men-deflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data dikumpulkan adalah nilai

https://pagaralamkota.bps.go.id

sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB adh Konstan-nya diperoleh dengan cara mendeflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak-langsung (arus komoditas), yaitu:

a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.

b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Transport and Trade Margin*) sulit diperoleh.

c. Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

https://pagaralamkota.bps.go.id

2.5 PERUBAHAN INVENTORI

i. Pendahuluan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal.

Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii. Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress)*, serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna pertambahan (bertanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

https://pagaralamkota.bps.go.id

iii. Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sebagai berikut:

a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
b. Berbagai jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
f. Ternak untuk tujuan dipotong;
g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan

bakar atau persediaan; dan

h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv. Penghitungan Perubahan Inventori Tahunan

1.Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah :

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau dari mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalian;
- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.
- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.
- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Ditjennak Kementan.

https://pagaralamkota.bps.go.id

2.Metode Penghitungan

Terdapat 2 metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi "korporasi", sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi "komoditas".

Di lihat dari sisi manfaat-nya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung.Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

PendekatanLangsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh

nilai perubahan inventori adh berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sebagai berikut:

- menghitung posisi inventori adh Konstan, dengan cara men*deflate* stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- menghitung perubahan inventori adh Konstan dengan mengurangkan posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- menghitung perubahan inventori adh Berlaku dengan meng*inflate* perubahan inventori adh Konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori adh Berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori adh Konstan dihitung dengan: a. men*deflate* nilai perubahan inventori adh Berlaku dengan indeks harga yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

https://pagaralamkota.bps.go.id

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah bahwa :

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harga-nya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara me-*mark-up*, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia;

2.6 EKSPOR DAN IMPOR

i. Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor disuatu wilayah menjadi semakin berkembang.

https://pagaralamkota.bps.go.id

ii. Konsep dan definisi

Ekspor-impor di suatu wilayah didefiniskan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

iii. Cakupan

Ekspor-Impor pada suatu wilayah terdiri dari:

a. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut
b. Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut
   Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya
c. Net Ekspor antar daerah
   - Ekspor antar daerah
   - Impor antar daerah

iv. Penghitungsn Ekspor-Impor Tahunan

1.Sumber data

a. Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US$)

b. Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US$)
c. Neraca Pembayaran Indonesia dari BI
d. Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
e. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang;
f. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei.
g. Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia

2.Metode Penghitungan

Ekspor-Impor barang luar negeri dinilai menurut harga free on board (fob) dalam US$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan Impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaski yang tidak terdokumentasi (*undocumented trasnsaction*) baik oleh residen maupun non residen. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.

https://pagaralamkota.bps.go.id

BAB III

TINJAUAN PEREKONOMIAN KOTA PAGAR ALAM BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN KOTA PAGAR ALAM 2017 - 2021

https://pagaralamkota.bps.go.id

Faktor internal dan eksternal adalah dua faktor yang mempengaruhi perubahan struktur ekonomi Kota Pagar Alam akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2017 s.d. 2021. Faktor internal dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Faktor eksternal lebih dipengaruhi oleh perubahan teknologi yang mempercepat produksi dan distribusi barang dan jasa serta kebijakan pemerintah Kota Pagar Alam terkait perekonomian.

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Kota Pagar Alam digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Untuk lebih jelasnya, perilaku masing-masing komponen pengeluaran itu akan diuraikan pada bagian berikut.

https://pagaralamkota.bps.go.id

3.1 TINJAUAN AGREGAT PDRB KOTA PAGAR ALAM MENURUT PENGELUARAN

Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran Kota Pagar Alam
Tahun 2017-2021

(Miliar Rp)

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	1 878,7	2 040,6	2 197,8	2 258,4	2 304,1
2. Konsumsi LNPRT	47,1	53,0	59,5	55,1	57,5
3. Konsumsi Pemerintah	450,9	478,5	518,9	474,3	493,7
4. PMTB	1 035,3	1 078,3	1 055,1	1 082,9	1 089,9
5. Perubahan Inventori	146,8	290,8	- 21,3	- 31,1	12,1
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	- 1 010,3	- 1 267,9	- 1 018,4	- 1 009,2	- 951,3
Total PDRB	2 548,5	2 673,3	2 791,6	2 830,4	3 006,0

Kondisi perekonomian Kota Pagar Alam selama lima tahun terakhir menunjukkan pergerakan yang cukup baik jika dilihat dari sisi pengeluaran. Hal ini terlihat dari PDRB yang

terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan arah positif. Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui Nilai PDRB ADHB dan ADHK serta pertumbuhan pada total PDRB.

Nilai PDRB Kota Pagar Alam (adh Berlaku) selama periode tahun 2017 s.d. 2021 menunjukkan peningkatan yang cukup baik dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume.

Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran Kota Pagar Alam
Tahun 2017-2021

(Miliar Rp)

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	1 232,2	1 283,7	1 350,5	1 354,4	1 373,5
2. Konsumsi LNPRT	34,7	37,3	40,2	37,4	38,0
3. Konsumsi Pemerintah	319,2	318,6	331,2	298,0	303,8
4. PMTB	834,4	849,3	841,8	857,5	844,0
5. Perubahan Inventori	93,8	282,5	- 19,2	- 23,2	8,9
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	- 442,9	- 613,3	- 310,7	- 289,9	- 235,8
Total PDRB	2 071,4	2 158,1	2 233,8	2 234,2	2 332,4

https://pagaralamkota.bps.go.id

Selain dinilai atas dasar harga (adh) berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai adh konstan 2010 atau adh berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan adh konstan, PDRB dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB komponen pengeluaran adh konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2017-2021 gambaran tentang perkembangan ekonomi Kota Pagar Alam berdasarkan PDRB adh Konstan dapat dilihat pada Tabel 2 diatas. Sama halnya dengan

PDRB adh berlaku seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB adh konstan juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Grafik 1. Perbandingan PDRB adh Berlaku dan adh Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kota Pagar Alam (Milyar Rupiah), Tahun 2017-2021

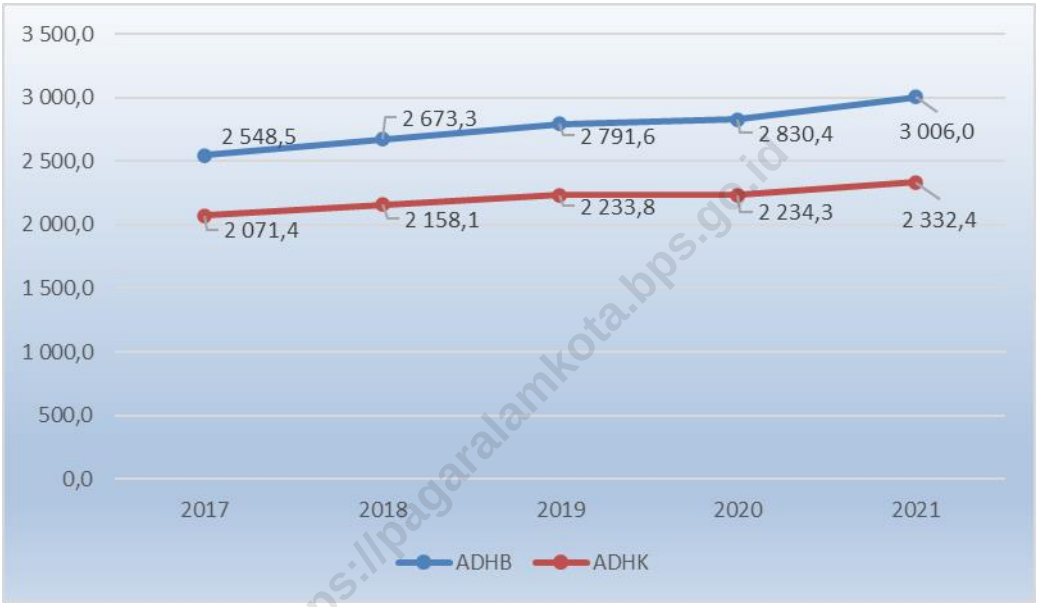

https://pagaralamkota.bps.go.id

Dari grafik di atas nampak bahwa pada umumnya nilai PDRB adh Berlaku selalu lebih besar dari nilai PDRB adh Konstan. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB adh Berlaku.

Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannnya yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), konsumsi akhir LNPRT (PK-LNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), dan ekspor neto (E) atau ekspor dikurangi impor.

Tabel 3. Distribusi PDRB ADHB
Menurut Pengeluaran Kota Pagar Alam
Tahun 2017-2021

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	73,72	76,33	78,73	79,79	76,65
2. Konsumsi LNPRT	1,85	1,98	2,13	1,95	1,91
3. Konsumsi Pemerintah	17,69	17,90	18,59	16,76	16,42
4. PMTB	40,62	40,34	37,80	38,26	36,26
5. Perubahan Inventori	5,76	10,88	- 0,76	-1,10	0,40
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-39,64	-47,43	-36,48	-35,66	-31,64
Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

https://pagaralamkota.bps.go.id

Berdasarkan Tabel 3 diatas terlihat bahwa selama periode 2017-2021 produk yang dikonsumsi di wilayah domestik sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (di atas 60 persen). Distribusi net ekspor barang dan jasa yang negatif menunjukkan bahwa impor barang dan jasa lebih besar dari pada ekspor barang dan jasa keluar daerah, karena sekitar 50 s.d 80 persen permintaan domestik masih dipenuhi oleh produk impor dari luar wilayah Kota Pagar Alam. Di sisi lain, pengeluaran untuk kapital (PMTB) juga mempunyai nilai yang cukup besar dengan kontribusi di atas 35 persen. Proporsi konsumsi akhir pemerintah berada pada rentang 17-19 persen. Hal ini menunjukkan bahwa belanja yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pagar Alam cukup besar selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2017-2021 perdagangan antar wilayah Kota Pagar Alam yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor, menunjukkan bahwa nilai impor cenderung lebih tinggi dari nilai ekspor. Kecenderungan perdagangan antar wilayah Kota Pagar Alam dalam periode tersebut selalu menunjukkan posisi "defisit", dimana nilai impor masih lebih besar dari pada nilai ekspor. Perlu upaya keras dari pemerintah Kota Pagar Alam agar kota Pagar Alam dapat lebih meningkatkan produksi produk-produk domestik,

diharapkan dengan peningkatan produksi produk-produk domestik dapat menggairahkan perekonomian dalam Kota Pagar Alam dan penyerapan tenaga kerja lokal semakin tinggi.

Tabel 4. Pertumbuhan PDRB ADHK 2010
Menurut Pengeluaran Kota Pagar Alam
Tahun 2017-2021

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	3,63	4,18	5,21	0,29	1,41
2. Konsumsi LNPRT	3,20	7,77	7,55	- 6,79	1,39
3. Konsumsi Pemerintah	-0,71	-0,19	3,93	- 10,01	1,95
4. PMTB	2,32	1,79	-0,88	1,87	-1,57
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
Total PDRB	4,81	4,18	3,51	0,02	4,39

https://pagaralamkota.bps.go.id

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kota Pagar Alam dari tahun 2017 s.d 2021 secara rata-rata mencapai 3.38 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2017 yakni sebesar 4,81 persen dan terendah terjadi pada tahun 2020 (0,02 persen).

Sementara itu indeks implisit[1] PDRB yang menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri), juga menunjukkan peningkatan. Indeks Implisit Kota Pagar Alam dari tahun 2017 sampai dengan 2021 secara

[1] *Indeks perkembangan*

berturut-turut masing-masing sebesar 123,03 persen (2017); 123,87 persen (2018); 124,97 persen (2019); 126,68 persen (2020) dan 128,88 persen (2021).

Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran
Kota Pagar AlamTahun 2017-2021

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	152,47	158,97	162,74	166,74	167,75
2. Konsumsi LNPRT	135,96	141,85	148,12	147,16	151,44
3. Konsumsi Pemerintah	141,23	150,16	156,69	159,16	162,48
4. PMTB	124,08	126,97	125,34	126,28	129,13
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
Total PDRB	123,03	123,87	124,97	126,68	128,88

https://pagaralamkota.bps.go.id

3.2 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran. Data berikut menunjukkan hal tersebut dimana sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga.

Data berikut menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2017-2021 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal (adh Berlaku) maupun riil (adh Konstan), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2017 sampai dengan 2021 cukup berfluktuatif. Tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu 79,79 persen dan terendah terjadi pada tahun 2017 yaitu 73,72 persen.

Masa pemulihan ekonomi telah mendorong rumah tangga untuk memperbaiki serta mengembalikan perilaku dan kebiasaan konsumsinya setelah sekian lama mengalami masa-masa krisis. Melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik (termasuk yang berasal dari impor) turut menjadi pemicu meningkatnya belanja untuk konsumsi termasuk konsumsi rumah tangga.

Tabel 6. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Pagar AlamTahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB *(Miliar Rp)*	1 878,7	2 040,6	2 197,8	2 258,4	2 304,1
b, ADHK 2010 *(Miliar Rp)*	1 232,2	1 283,7	1 350,5	1 354,4	1 373,5
Proporsi terhadap PDRB *(% ADHB)*	73,72	76,33	78,73	79,79	76,65
Rata-rata konsumsi per-Rumah Tangga /tahun *(Ribu Rp)*					
a. ADHB	54 940,31	59 117,22	63 077,17	62 929,68	63 395,17
b. ADHK 2010	36 033,33	37 188,38	38 760,54	37 741,19	37 791,69
Rata-rata konsumsi per-kapita/tahun *(Ribu Rp)*					
c. ADHB	13 753,07	14 796,77	15 789,68	15 745,14	15 861,23
d. ADHK 2010	9 020,14	9 308,08	9 702,67	9 442,93	9 455,34
Pertumbuhan[2] (*Persen)*					
a. Total konsumsi RT	3,63	4,18	5,21	0,29	1,41
b. Per-RT	2,68	3,21	4,23	-2,63	0,13
c. Perkapita	2,66	3,19	4,24	-2,68	0,13
Jumlah RT *(unit)*	34 196	34 518	34 843	35 887	36 345
Jumlah penduduk *(orang)*	136 605	137 909	139 192	143 432	145 266

https://pagaralamkota.bps.go.id

Secara umum, rata-rata konsumsi per rumah tangga terus meningkat dari tahun ke tahun menurut adh Berlaku maunpun adh Konstan. Pada tahun 2020, terjadi penurunan rata-rata konsumsi per rumah tangga baik menurut adh Berlaku maupun adh Konstan. Pada tahun

[2]*Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)*

2017, secara umum setiap rumah tangga di Kota Pagar Alam menghabiskan dana sekitar 54,94 juta rupiah setahun untuk membiayai konsumsi baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan dsb). Pengeluaran rumah tangga ini terus meningkat menjadi 63,39 juta rupiah pada tahun 2021.

Sementara itu, rata-rata konsumsi per-kapita menunjukkan perkembangan yang searah dengan kenaikan jumlah penduduk, dan selalu diikuti pula oleh kenaikan nilai konsumsinya. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per-kapita menunjukkan peningkatan, baik adh Berlaku maupun adh Konstan 2010 pada 2017-2021. Sedangkan pada tahun 2020, pertumbuhan rata-rata konsumsi per kapita terkontraksi sebesar 2,68 persen. Namun demikian secara umum struktur konsumsi rumah tangga tidak mengalami perubahan secara signifikan.

https://pagaralamkota.bps.go.id

Tabel 7. Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Pagar AlamTahun 2017-2021[3]

(Persen)

Kelompok Konsumsi	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan Minuman dan Rokok	59,75	59,52	59,34	59,93	59,53
b. Pakaian dan Alas Kaki	3,08	3,17	3,22	3,17	3,17
c. Perumahan Perkakas Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	13,21	13,31	13,41	13,12	13,06
d. Kesehatan & Pendidikan	8,02	7,97	7,91	8,04	8,28
e. Transportasi Komunikasi Rekreasi dan Budaya	10,83	10,68	10,52	10,28	10,38
f. Hotel & Restoran	2,12	2,24	2,44	2,20	2,25
g. Lainnya	2,98	3,13	3,17	3,26	3,34
Total Konsumsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga adh Konstan sebesar 3,63 persen pada tahun 2017. Kemudian meningkat pada tahun-tahun berikutnya, hingga tumbuh sebesar

[3]*Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)*

5,21 persen pada tahun 2019. Pada tahun 2020 dan 2021 konsumsi rumah tangga tetap tumbuh positif meski melambat dari tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,29 persen dan 1,41 persen. Sementara itu konsumsi per-kapita meningkat dari 2,66 persen ditahun 2017 menjadi 4,24 persen pada tahun 2019, lalu terkontraksi sebesar 2,68 persen pada tahun 2020, kemudian kembali tumbuh sebesar 0,13 persen pada tahun 2021. Pada kurun waktu 2017-2019 peningkatan keseluruhan konsumsi rumah tangga secara "riil" lebih tinggi dari peningkatan jumlah penduduk yang umumnya berada di bawah 2 persen dan ini mengindikasikan terjadi perubahan tingkat kemakmuran masyarakat. Namun pada tahun 2020 pertumbuhan rata-rata konsumsi per kapita justru turun dan terbalik dengan pertumbuhan penduduk. Kemudian kondisi membaik pada tahun 2021 yang ditunjukkan dengan pertumbuhan yang positif.

Secara rata-rata dari tahun 2017 s.d 2021 nampak pada struktur konsumsi akhir rumah tangga Kota Pagar Alam, bahwa konsumsi makanan lebih tinggi dibandingkan konsumsi bukan makanan, Proporsi pengeluaran untuk makanan cenderung masih berada pada kisaran 59 persen.

Pola proporsi konsumsi di atas, menunjukkan tarik menarik antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan yang masih cukup kuat. Sungguhpun demikian, pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya.

https://pagaralamkota.bps.go.id

Tabel 8. Pertumbuhan Riil Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Pagar AlamTahun 2017-2021

(Persen)

Kelompok Konsumsi	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan Minuman dan Rokok	4,03	4,35	5,97	0,26	0,97
b. Pakaian dan Alas Kaki	2,20	3,84	7,10	-0,16	0,43
c. Perumahan Perkakas Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	2,46	2,56	4,56	0,25	0,44

Kelompok Konsumsi	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
d. Kesehatan & Pendidikan	3,90	4,63	4,50	2,68	3,02
e. Transportasi Komunikasi Rekreasi dan Budaya	3,32	3,99	2,50	-0,26	2,77
f. Hotel & Restoran	5,34	6,22	7,68	-7,14	3,87
g. Lainnya	2,10	6,17	2,17	2,45	3,67

Dilihat dari pertumbuhan pengeluaran rumah tangga untuk setiap kelompok konsumsi menunjukkan fluktuasi, Pertumbuhan ini menunjukkan adanya perubahan konsumsi rumah tangga dalam bentuk kuantum (volume) dari waktu ke waktu. Informasi ini menunjukkan terjadinya peningkatan kemakmuran masyarakat, meskipun hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu.

Tabel 9. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Pagar AlamTahun 2017-2021[4]

(Persen)

Kelompok Konsumsi	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	5,87	3,68	1,32	3,52	0,36
b. Pakaian dan Alas Kaki	3,56	7,74	2,09	1,48	1,43
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan, dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	4,76	6,67	3,76	0,28	1,13
d. Kesehatan & Pendidikan	3,57	3,08	2,39	1,69	2,03
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	5,19	2,94	3,48	0,69	0,21
f. Hotel & Restoran	4,34	7,71	9,30	-0,31	0,35
g. Lainnya	6,29	7,34	6,83	3,22	0,74

[4]*Tingkat perubahan harga produk konsumsi*

https://pagaralamkota.bps.go.id

Sementara itu, tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam Tabel 9 menunjukkan fluktuasi setiap tahunnya. Peningkatan harga (inflasi) tertinggi pada tahun 2021 terjadi pada sub kelompok kesehatan dan pendidikan (2,03 persen), diikuti sub kelompok pakaian dan alas kaki (1,43 persen) dan sub kelompok perumahan, perkakas, perlengkapan, dan penyelenggaraan rumah tangga (1,13 persen). Rata-rata peningkatan harga (inflasi) pada tahun 2021 relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 peningkatan harga tertinggi terjadi pada sub kelompok makanan, minuman, dan rokok (3,52 persen). Sub kelompok hotel dan restoran mengalami peningkatan harga tertinggi pada tahun 2019 sebesar 9,30 persen. Pada tahun 2018, sub kelompok pakaian dan alas kaki menempati urutan pertama peningkatan harga yaitu sebesar 7,74 persen. Dan pada tahun 2017, peningkatan harga tertinggi terjadi pada sub kelompok lainnya.

3.3 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Konsumsi akhir LNPRT peranannya dalam PDRB menurut pengeluaran sangat minor dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya, Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah semestinya dapat lebih ditingkatkan lagi.

https://pagaralamkota.bps.go.id

Tabel 10. Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT
Kota Pagar AlamTahun 2017-2021

(Milyar Rp)

U r a i a n	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a, ADHB *(Miliar Rp)*	47,12	52,98	59,50	55,10	57,49
b, ADHK 2010 *(Miliar Rp)*	34,66	37,35	40,17	37,44	37,96
Proporsi terhadap PDRB *(% ADHB)*	1,85	1,98	2,13	1,95	1,91

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir LNPRT menunjukkan peningkatan, baik untuk adh berlaku maupun adh konstan 2010. Pada tahun 2017 total pengeluaran konsumsi akhir LNPRT adh berlaku sebesar 47,12 milyar rupiah, kemudian meningkat terus hingga pada tahun 2019 nilainya mencapai 59,50 milyar rupiah lalu menurun menjadi 55,10 miliar pada

tahun 2020 dan kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 57,49 milyar. Demikian halnya dengan konsumsi LNPRT adh konstan 2010, secara umum yang juga mengalami peningkatan pada kurun 2017-2021. Hal ini mengindikasikan bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran LNPRT dari sisi kuantitas pada kurun waktu tersebut, meskipun sempat terjadi penurunan kuantitas pada tahun 2020. Peran LNPRT terhadap total PDRB berkisar antara 1,85–2,13 persen.

3.4 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan pengeluaran akhir rumah tangga dan LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian suatu wilayah, Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian Kota Pagar Alam serta bagaimana perkembangannya akan dijelaskan dalam uraian dibawah ini.

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan pada adh Berlaku. Pada tahun 2017 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah adh Berlaku sebesar 450,87 miliar rupiah, kemudian meningkat terus hingga pada tahun 2019 nilainya mencapai 518,94 miliar rupiah. Namun pada tahun 2020 pengeluaran pemerintah pun tak luput dari imbas wabah Covid-19 sehingga turun menjadi 474,34 miliar rupiah. Pada tahun 2021 pengeluaran pemerintah kembali meningkat menjadi 493,70 miliar rupiah.

Adapun konsumsi pemerintah adh konstan 2010, pada tahun 2019 secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas dibandingkan 3 tahun sebelumnya dengan total pengeluaran sebesar 331,18 miliar rupiah. Di tahun 2020 pengeluaran pemerintah kembali menurun hingga hanya sebesar 298,03 miliar rupiah saja. Kemudian kondisi membaik di 2021 dimana pengeluaran pemerintah naik menjadi 303,84 milyar rupiah.

Pada tahun 2020-2021 proporsi pengeluaran pemerintah terhadap PDRB berada pada angka 16 persen setelah pada periode 3 tahun sebelumnya stabil pada angka 17-18 persen. Hal ini berarti proporsi pengeluaran pemerintah pada tahun 2021 merupakan yang terendah selama periode 2017-2021. Sedangkan proporsi tertinggi terjadi pada tahun 2019 yang mencapai 18,59 persen.

https://pagaralamkota.bps.go.id

Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2017-2021

U r a i a n	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a, ADHB *(Miliar Rp)*	450,87	478,46	518,94	474,34	493,70
b, ADHK 2010 *(Miliar Rp)*	319,25	318,64	331,18	298,03	303,84
Proporsi terhadap PDRB *(% - ADHB)*	17,69	17,90	18,59	16,76	16,42
Konsumsi Pemerintah per-kapita *(Ribu Rp)*					
a. ADHB	3 300,56	3 469,41	3 728,21	3 307,07	3 398,57
b. ADHK 2010	2 337,00	2 310,53	2 379,31	2 077,85	2 091,62
Konsumsi Pemerintah per-pegawai pemerintah *(Ribu Rp)*					
a. ADHB	137 965,87	153 797,18	172 289,92	163 734,83	179 852,99
b. ADHK 2010	97 688,54	102 424,77	109 953,85	102 875,31	110 689,02
Pertumbuhan[5] *(Persen)*					
a. Total konsumsi pemerintah	-0,71	-0,19	3,93	-10.01	1.95
b. Konsumsi perkapita	-1,64	-1,13	2,98	-12,67	0,66
c. Konsumsi per-pegawai	16,12	4,85	7,35	-6,44	7,60
Jumlah Pegawai Pemerintah[6]	3 268	3 111	3 012	2 897	2 745
Jumlah penduduk *(000 org)*	136,61	137,91	139,19	143,43	145,27

https://pagaralamkota.bps.go.id

Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total pada tahun 2021 menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita. Pada tahun 2017 konsumsi pemerintah per-kapita adh Berlaku sebesar 3,30 juta rupiah dan terus meningkat sampai tahun-tahun berikutnya hingga tahun 2019 dan pada tahun 2020 terjadi penurunan kemudian meningkat kembali pada tahun 2021 (lihat Tabel 11).

Rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita adh Konstan (2010) menunjukkan adanya pertumbuhan yang negatif selama tahun 2017 sampai tahun 2018 (lihat Tabel 11). Pada tahun

[5] *Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan /ADHK 2010)*
[6] *Tidak termasuk polisi dan militer*

2019 mengalami pertumbuhan positif yang cukup baik yaitu 2,98 persen. Namun pada tahun 2020 kembali terkontraksi bahkan mejadi yang terendah selama 5 tahun terakhir. Penurunan tersebut menunjukkan adanya penurunan pengeluaran konsumsi pemerintah secara kuantitas. Tahun 2021 konsumsi pemerintah per-kapita mengalami pertumbuhan yang positif kembali.

Rata-rata konsumsi per pegawai pemerintah menunjukkan kecenderungan meningkat pada kurun 2017-2021. Pada periode tersebut konsumsi pemerintah per-pegawai meningkat hingga 179,85 juta rupiah pada tahun 2021 (lihat Tabel 11).

Pada tingkat harga konstan 2010 indikator pemerataan menurut pegawai ini juga menunjukkan kecenderungan meningkat pada kurun 2017-2021, meski pada tahun 2020 kondisinya seakan kembali ke tahun 2018 dengan dengan nilai 102,87 juta rupiah. Persentase kenaikan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2017, yaitu sebesar 16,12 persen tetapi terkontraksi di tahun 2020 sebesar 6,44 persen.

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara "riil" menunjukkan peningkatan baik secara keseluruhan maupun rata-rata (per penduduk maupun per pegawai pemerintah). Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas penggunaan sumber daya finansial oleh pemerintah. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 untuk total konsumsi pemerintah yaitu sebesar 3,93 persen; untuk konsumsi per-kapita 2,98 persen; dan untuk konsumsi per-pegawai 7,35 persen.

https://pagaralamkota.bps.go.id

Hal lain yang patut dicermati adalah perbandingan antara jumlah pegawai pemerintah dengan jumlah penduduk. Data di atas menunjukkan bahwa jumlah pegawai pemerintah cenderung menurun selama periode 2017-2021 dari 3.268 orang (2017) menjadi 2.745 orang (2021). Sedangkan jumlah penduduk meningkat dari 136 ribu orang pada tahun 2017 menjadi 145 ribu orang pada tahun 2021. Rasio antara penduduk dengan pegawai pemerintah dalam kurun waktu tersebut meningkat dari 42 (2017) menjadi 53 (2021). Hal ini berarti pada tahun 2017 setiap satu pegawai pemerintah melayani sekitar 42 penduduk dan meningkat hingga pada tahun 2021 menjadi sekitar 53 penduduk.

3.5 PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dalam PDRB menurut pengeluaran menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi

investasi fisik. Pada sisi berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)[7]. Kapital berfungsi sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

PMTB menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun riil. Data pada tabel 12 menjelaskan bahwa secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2017-2021 berfluktuasi dari 2,32 persen (2017) menjadi -1,57 persen (2021). Pertumbuhan PMTB pada masing-masing komponen sangat bervariasi antar tahunnya. Sub komponen bangunan merupakan komponen dengan proporsi terbesar dalam pembentukan modal tetap. Pertumbuhan di sektor bangunan selalu tumbuh positif dan polanya relatif stabil dibandingkan dengan pertumbuhan sub komponen PMTB non bangunan.

https://pagaralamkota.bps.go.id

Tabel 12. Perkembangan dan Struktur PMTB
Kota Pagar Alam, Tahun 2017-2021

U r a i a n	**2017**	**2018**	**2019**	**2020***	**2021****
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB *(Miliar Rp)*	1 035,29	1 078,32	1 055,12	1 082,87	1 089,86
b. ADHK 2010 *(Miliar Rp)*	834,39	849,30	841,81	857,52	844,02
Proporsi terhadap PDRB *(% - ADHB)*	40,62	40,34	37,80	38,26	36,26
Struktur PMTB [8]					
a. Bangunan (*Miliar Rp*)	*745,48*	*790,79*	*781,24*	*793,32*	*813,24*
(%)	*(72,01)*	*(73,33)*	*(74,04)*	*(73,26)*	*(74,62)*
b. Non Bangunan (*Miliar Rp*)	*289,81*	*287,53*	*273,87*	*289,55*	*276,62*
(%)	*(27,99)*	*(26,67)*	*(25,96)*	*(26,74)*	*(25,38)*
Total PMTB *(Miliar Rp)*	*1 035,29*	*1 078,32*	*1 055,12*	*1 082,87*	*1 089,86*
(%)	*(100,00)*	*(100,00)*	*(100,00)*	*(100,00)*	*(100,00)*
Pertumbuhan[9] (%)					
a. Bangunan	**2,82**	**2,67**	**1,02**	**0,91**	**0,61**
b. Non Bangunan	**1,10**	**-0,41**	**-5,73**	**4,49**	**-7,35**
Total PMTB	**2,32**	**1,79**	**-0,88**	**1,87**	**-1,57**

[7] *Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor*
[8] *Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku /ADHB)*
[9] *Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)*

Proporsi PMTB terhadap total PDRB berfluktuasi selama periode 2017-2021 (Tabel 13). Perubahan yang terjadi pada proporsi tersebut tidak lepas dari pengaruh pertumbuhan yang terjadi pada masing-masing sub komponen PMTB tersebut.

Pertumbuhan "riil" sub komponen bangunan pada kurun 2017-2021 selalu tumbuh positif meskipun menunjukkan perlambatan dari tahun ke tahun. Sub komponen ini mengalami pertumbuhan terendah pada tahun 2021 yaitu sebesar 0,61 persen, sedangkan pertumbuhan tercepat dicapai pada tahun 2017 sebesar 2,82 persen. Sementara itu, sub komponen non bangunan pada tahun 2018 hingga 2019 terkontraksi masing-masing secara berturut-turut sebesar 0,41 persen dan 5,73 persen. Setelah mengalami percepatan pada tahun 2020 sebesar 4,49 persen, pada tahun 2021 kembali terkontraksi cukup dalam sebesar 7,35 persen.

https://pagaralamkota.bps.go.id

3.6 PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk **"persediaan"** berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (positif) dan atau pengurangan (negatif),

Tabel 13. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kota Pagar Alam,Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB *(Miliar Rp)*	146,77	290,82	-21,34	-31,06	12,10
b. ADHK 2010 *(Miliar Rp)*	93,83	282,47	-19,22	-23,24	8,94
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	5,76	10,88	-0,76	-1,10	0,40

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor barang dan jasa). Apabila perubahan inventori positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila negatif berarti terjadi pengurangan

persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna, Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun (konsep stok).

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis secara rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah bahwa proporsi dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

https://pagaralamkota.bps.go.id

3.7 PERKEMBANGAN EKSPOR BARANG DAN JASA

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik, tetapi dikonsumsi oleh pihak luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya termasuk pula dalam ekspor.

Tabel 14. Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa
Kota Pagar AlamTahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Ekspor					
a. ADHB *(Miliar Rp)*	603,96	723,40	617,13	581,64	602,40
b. ADHK 2010 *(Miliar Rp)*	564,07	611,96	607,16	565,33	565,73
Proporsi terhadap PDRB *(% - ADHB)*	23,70	27,06	22,11	20,55	20,04
Laju Pertumbuhan	28,39	8,49	-0,78	-6,89	0,07

Secara total, nilai ekspor Kota Pagar Alam ke luar menunjukkan perubahan yang berfluktuatif dari tahun 2017 hingga tahun 2021, dimana pada tahun 2017, nilai ekspor 603,96 miliar rupiah lalu sempat mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebesar 723,40 miliar rupiah.

Nilai ekspor ditahun 2018 hingga 2021 cenderung turun. Nilai ekspor pada tahun 2021 sebesar 602,40 milyar rupiah. Nilai ini hampir sama dengan nilai ekspor pada tahun 2017. Sejalan dengan nilai ekspor adh Berlaku, nilai ekspor adh Konstan 2010 juga menunjukkan arah pertumbuhan yang juga berfluktuatif. Pada tahun 2020, secara ADHB maupun secara ADHK nilai ekspor mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena selain harga beberapa komoditas ekspor naik juga terjadi pelemahan nilai tukar rupiah.

Sedangkan pertumbuhan riil total ekspor tertinggi terjadi pada tahun 2017, yaitu 28,39 persen. Pertumbuhan yang tinggi tersebut disebabkan adanya peningkatan volume ekspor dalam bentuk barang. Sementara itu, ekspor terkontraksi pada tahun 2019 (-0,78 persen) dan tahun 2020 (-6,89 persen). Pertumbuhan negatif ekspor barang pada tahun 2019 dan 2020 ini juga didorong oleh turunnya harga beberapa komoditi unggulan hingga mencapai titik harga yang kurang ekonomis.

https://pagaralamkota.bps.go.id

3.8 PERKEMBANGAN IMPOR BARANG DAN JASA

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori), di dalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi Kota Pagar Alam, sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangkan nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha.

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongan-nya bisa berbeda dengan ekspor.

Tabel 15. Perkembangan Impor Barang dan Jasa
Kota Pagar Alam,Tahun 2017-2021

U r a i a n	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Impor					
a, ADHB *(Miliar Rp)*	1 614,23	1 991,30	1 635,53	1 590,90	1 553,70
b, ADHK 2010 *(Miliar Rp)*	1 006,95	1 225,30	917,87	855,24	801,58
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	63,34	74,49	58,59	56,21	51,69
Laju Perumbuhan	18,59	21,68	-25,09	-6,82	-6,27

https://pagaralamkota.bps.go.id

Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor menunjukkan semakin kuatnya ketergantungan Kota Pagar Alam terhadap ekonomi atau produk Negara/daerah lain sampai tahun 2021. Pada tahun 2019 ketergantungan dari produk impor menurun hingga menjadi minus 25,09 persen dan sampai dengan tahun 2021 masih mengalami penurunan hingga -6,27 persen. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Kota Pagar Alam di luar negeri baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa).

Tabel 15 di atas menunjukkan pola perkembangan impor Kota Pagar Alam pada periode tahun 2017 sampai dengan 2021 (baik adh berlaku maupun adh konstan 2010). Secara "riil" nilai impor mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2018 sebesar 21,68 persen dengan nominal mencapai 1.225,30 miliar rupiah.

Menurut komposisinya, sebagian besar produk impor berbentuk barang, yang memiliki porsi sekitar 60 - 75 persen, sedangkan sisanya dalam bentuk impor jasa.

BAB IV

PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB KOTA PAGAR ALAM MENURUT PENGELUARAN 2017-2021

https://pagaralamkota.bps.go.id

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia

4.1 PDRB (Nominal)

PDRB dapat digunakan sebagai ukuran "produktivitas", karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, maka disajikan data PDRB perkapita

https://pegaralamkota.bps.go.id

Tabel 16. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita
Kota Pagar Alam, Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB *(Miliar Rp)*					
- ADHB	2 548,52	2 673,29	2 791,62	2 830,36	3 005,95
- ADHK 2010	2 071,44	2 158,09	2 233,77	2 234,27	2 332,45
PDRB perkapita *(Ribu Rp)*					
- ADHB	18 656,12	19 384,48	20 055,87	19 733,10	20 692,73
- ADHK 2010	15 163,74	15 648,67	16 048,11	15 577,18	16 056,39
Pertumbuhan					
PDRB perkapita ADHK 2010	3,83	3,20	2,55	-2,93	3,08
Jumlah penduduk *(jiwa)*	136 605	137 909	139 192	143 432	145 266
Pertumbuhan	0,94	0,95	0,93	3,05	1,28

PDRB per-kapita Kota Pagar Alam menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun (Tabel 16), seiring dengan kenaikan jumlah penduduk Indikator ini menunjukkan bahwa secara

ekonomi setiap penduduk Pagar Alam rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut.

Sementara itu pertumbuhan per-kapita pada periode 2017-2019 secara "riil" selalu positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3.19 persen, namun pada tahun 2020 petumbuhannya terkontraksi sebesar 2,93 persen. Terkontraksinya pertumbuhan PDRB secara "riil" pada tahun 2020 ini tentu tidak sejalan pertumbuhan penduduk. Artinya terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi secara "riil" maupun secara kualitas pada tahun 2020 yang tidak terlepas dari pengaruh wabah Covid-19. Kemudian pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi per-kapita mengalami pertumbuhan yang positif, seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi dengan menerapkan "new normal" dalam menghadapi Covid-19.

4.2 PERBANDINGAN PENGGUNAAN PDRB UNTUK KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP EKSPOR

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara produk yang dikonsumsi rumah tangga di wilayah domestik dengan produk yang diekspor. Selama ini konsumsi rumah tangga mempunyai peranan yang sangat dominan dalam penggunaan PDRB Pagar Alam (sekitar 65 persen), yang artinya bahwa seluruh produk yang dihasilkan di wilayah Pagar Alam sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Namun di dalamnya termasuk pula sebagian produk yang berasal dari impor.

https://pagaralamkota.bps.go.id

Tabel 17. Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi RT (ADHB) *(Miliar Rp)*	1 878,74	2 040,61	2 197,80	2258,36	2304,10
Ekspor Barang dan Jasa (ADHB) *(Miliar Rp)*	603,96	723,40	617,13	581,64	602,40
Perbandingan Konsumsi RT terhadap Ekspor Barang dan Jasa	3,11	2,82	3,56	3,88	3,82

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2017, produk yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga lebih dari 3 kali produk yang dieskpor. Hal ini berarti bahwa sebagian besar penyediaan *(supply)* domestik diserap untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir rumah tangga. Penurunan rasio pada tahun 2018 (2,82) lebih disebabkan karena peningkatan nilai ekspor lebih kecil dibandingkan dengan peningkatan konsumsi rumah tangga. Secara implisit, data tersebut menjelaskan bahwa nilai konsumsi akhir rumah tangga meningkat cukup tinggi namun peningkatan nilai ekspor tidak sebanding dengan peningkatan konsumsi rumah tangga. Peningkatan dan penurunan tersebut disebabkan oleh perubahan volume maupun harga.

4.3 PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap).

https://pagaralamkota.bps.go.id

Tabel 18. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT(ADHB) *(Miliar Rp)*	1 878,74	2 040,61	2 197,80	2258,36	2304,10
Total PMTB (ADHB) *(Miliar Rp)*	1 035,29	1 078,32	1 055,12	1082,87	1089,86
Perbandingan Konsumsi RT terhadap PMTB	1,81	1,89	2,08	2,09	2,11

Seperti halnya terhadap ekspor luar negeri, rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB cenderung bertambah, dari sebesar 1,81 pada tahun 2017 menjadi 2,11 pada tahun 2021. Hal ini terjadi karena kenaikan nilai investasi lebih lambat dibandingkan dengan konsumsi akhir rumah tangga yang mengalami percepatan.

4.4 PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Tabel 19. Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kota Pagar Alam, Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) *(Miliar Rp)*					
a. Rumah tangga	1 878,74	2 040,61	2 197,80	2 258,36	2 304,10
b. LNPRT	47,12	52,98	59,50	55,10	57,49
c. Pemerintah	450,87	478,46	518,94	474,34	493,70
Jumlah	2 376,73	2 572,05	2 776,24	2 787,80	2 855,29
PDRB(ADHB) *(Miliar Rp)*	2 548,52	2 673,29	2 791,62	2 830,36	3 005,95
Proporsi (*persen*)	93,26	96,21	99,45	98,50	94,99

https://pagaralamkota.bps.go.id

Sebagian besar barang dan jasa yang berada di wilayah domestik digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (lebih dari 90 persen). Konsumsi akhir makin meningkat setiap tahunnya, diikuti juga proporsinya terhadap PDRB. Dalam hal ini, produk yang tidak digunakan menjadi konsumsi akhir (PMTB atau eskpor) memiliki peran yang relatif kecil.

4.5 PERBANDINGAN EKSPOR TERHADAP PMTB

Ekspor merupakan produk yang tidak dikonsumsi di wilayah domestik, tetapi diperdagangkan ke luar negeri/provinsi. Untuk menghasilkan produk yang diekspor kemungkinan besar menggunakan kapital (PMTB). Sementara di sisi lain, sebagian barang yang diekspor bisa pula berupa barang capital. Rasio ekspor terhadap PMTB dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan antara nilai produk ekspor dengan nilai produk yang menjadi kapital (PMTB).

Tabel 20. Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB) Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ekspor Barang dan Jasa (ADHB) *(Miliar Rp)*	603,96	723,40	617,13	581,64	602,40
Total PMTB (ADHB) *(Miliar Rp)*	1 035,29	1 078,32	1 055,12	1 082,87	1 089,86
Rasio Ekspor terhadap PMTB	0,58	0,67	0,58	0,54	0,55

https://pagaralamkota.bps.go.id

Pada periode 2017–2021 ekspor Pagar Alam ke luar wilayah mempunyai nilai yang lebih rendah dari PMTB (Tabel 20). Untuk menghasilkan seluruh produk domestik (termasuk ekspor) disyaratkan tersedianya sejumlah kapital (yang di dalamnya termasuk pula kapital impor). Penurunan rasio tersebut di antaranya disebabkan oleh kenaikan PMTB yang relatif lebih pesat dibandingkan dengan kenaikan ekspor.

4.6 PERBANDINGAN PDRB TERHADAP IMPOR

Rasio ini memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB) dengan produk yang berasal dari impor. Selain itu, data tersebut menjelaskan tentang ketergantungan PDRB terhadap produk yang dihasilkan oleh negara/provinsi lain. Jika rasionya kecil berarti ketergantungan akan impor semakin tinggi, dan sebaliknya.

Rasio PDRB terhadap impor tahun 2017-2021 berkisar antara 1,34 (2018) sampai 1,93 (2021). Rasio ini menunjukkan bahwa hampir setengah dari PDRB Kota Pagar Alam tergantung terhadap produk dari luar Kota Pagar Alam.

https://pagaralamkota.bps.go.id

Tabel 21. Rasio PDRB terhadap Impor
Kota Pagar Alam Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHB) *(Miliar Rp)*	2 548,52	2 673,29	2 791,62	2 830,36	3 005,95
Total Impor (ADHB) *(Miliar Rp)*	1 614,23	1 991,30	1 635,53	1 590,90	1 553,70
Rasio PDRB terhadap Impor	1,58	1,34	1,71	1,78	1,93

4.7 KESEIMBANGAN TOTAL PENYEDIAAN DAN TOTAL PERMINTAAN

Rasio ini dapat menunjukkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi suatu daerah oleh produk yang berasal dari impor. Ketergantungan (ketidakseimbangan) tersebut dapat dilihat melalui keseimbangan antara total penyediaan (*supply*) dengan total permintaan akhir (*demand*).

Dari Tabel 22, dapat dilihat bahwa untuk memenuhi permintaan akhir regional Pagar Alam, sebagian produk masih harus didatangkan dari luar daerah, dengan rentang 35-43

persen. Dengan kata lain, kebutuhan masyarakat baru bisa dipenuhi sekitar 57-65 persen dari hasil produksi regional Pagar Alam. Dalam kurun waktu tersebut, tendensi permintaan (akhir) masyarakat terus meningkat setiap tahunnya, dari 4,16 trilyun rupiah (2017) menjadi sebesar 4,56 trilyun rupiah (2021).

Di sisi lain "penyediaan" produk barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh ekonomi regional Pagar Alam masing-masing sebesar 2,55 trilyun rupiah (2017) dan meningkat menjadi 3,01 trilyun rupiah pada tahun 2021. Karena produk di dalam regional Pagar Alam tidak mampu mencukupi seluruh kebutuhan permintaan, maka berbagai produk barang dan jasa diimpor, baik dari luar negeri maupun dari luar wilayah dengan nilai masing-masing tahun sebesar 1,61 trilyun rupiah (2017) menjadi 1,55 trilyun rupiah pada tahun 2021.

https://pagaralamkotabps.go.id

Tabel 22. Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan
Kota Pagar Alam, Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Penyediaan					
PDRB (ADHB)	2 548,52	2 673,29	2 791,62	2 830,36	3 005,95
(Miliar Rp)					
%	*(61,22)*	*(57,31)*	*(63,06)*	*(64,02)*	*(65,93)*
Total nilai Impor ADHB	1 614,23	1 991,30	1 635,53	1 590,90	1 553,70
(Miliar Rp)					
%	*(38,78)*	*(42,69)*	*(36,94)*	*(35,98)*	*(34,07)*
Total Permintaan Akhir[1] *(Miliar Rp)*	4 162,75	4 664,59	4 427,15	4 421,26	4 559,65
%	*(100,00)*	*(100,00)*	*(100,00)*	*(100,00)*	*(100,00)*

4.8 NERACA PERDAGANGAN (TRADE BALANCE)

Transaksi devisa yang berasal dari perdagangan barang dan jasa dengan pihak luar negeri (non-residen) dan luar kota dapat dilihat melalui neraca perdagangan. Secara konsep, selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut sebagai **"Ekspor Neto".** Apabila nilai ekspor

[1] *Termasuk diskrepansi statistik*

lebih besar dari nilai impor, maka terjadi surplus, dan sebaliknya yang terjadi adalah defisit. Dilihat dari arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka terjadi aliran devisa masuk, sebaliknya kalau posisinya defisit maka terjadi aliran devisa keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu wilayah di antaranya ditentukan oleh proses tersebut.

Selain gambaran posisi neraca perdagangan, dapat juga dilihat perbandingan (rasio) antara nilai ekspor terhadap impor, meskipun hanya berlaku secara total. Namun rasio tersebut tidak dapat merefleksikan perbandingan menurut jenis komoditas, harga maupun kuantum. Apabila rasio lebih besar dari 1 (satu) maka nilai ekspor lebih tinggi dari pada nilai impor, sebaliknya apabila rasio kurang dari 1 (satu) berarti nilai impor lebih tinggi dari pada nilai ekspor. Besar kecilnya ekspor atau impor suatu negara sangat tergantung kepada kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakatnya.

https://pagaralamkota.bps.go.id

Tabel 23. Neraca Perdagangan Barang dan Jasa,
Kota Pagar AlamTahun 2017-2021

U r a i a n	**2017**	**2018**	**2019**	**2020***	**2021****
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor (ADHB) *(Miliar Rp)*	603,96	723,40	617,13	581,64	602,40
Nilai Impor (ADHB)*(Miliar Rp)*	1 614,23	1 991,30	1 635,53	1 590,90	1 553,70
Net ekspor (X – M) *(Miliar Rp)*	-1 010,27	-1 267,90	-1 018,40	-1 009,25	- 951,29
Rasio ekspor terhadap Impor	0,37	0,36	0,38	0,37	0,39

Selama periode 2017-2021, posisi perdagangan barang dan jasa Kota Pagar Alam dengan luar negeri, selalu menunjukkan nilai negatif. Hal ini menunjukkan neraca perdagangan barang dan jasa Kota Pagar Alam selalu dalam posisi defisit. Nilai impor yang lebih besar dari ekspor menyebabkan adanya aliran devisa keluar. Defisit perdagangan luar negeri di Kota Pagar Alam yang terjadi antara tahun 2017 sampai dengan 2021 tercatat masing-masing sebesar 1,01 trilyun rupiah; 1,27 trilyun rupiah; 1,02 trilyun rupiah; 1,01 trilyun rupiah dan 0,95 trilyun rupiah. Sementara rasio ekspor terhadap impor pada kurun 2017-2021 cenderung stabil berkisar sebesar 0,3 persen. Rasio tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 0,39 persen.

BAB V

PENUTUP

https://pagaralamkota.bps.go.id

1. PDRB menurut penggunaan tahun 2017 hingga 2021 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kota Pagar Alam pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi penggunaan akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir baik untuk tujuan konsumsi akhir investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Tiga kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT dan pemerintah,

2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi investasi dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.

3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2017 hingga 2021 sehingga mudah dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio unit, dan sebagainya) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.

4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut penggunaan dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan *disposable*, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana.

5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar negeri (*external account*) secara agregat telah disajikan di sini seperti ekspor dan impor dan transfer berjalan (*current tranfer*) neto. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kota Pagar Alam terhadap ekonomi negara lain *(rest of the world*).

https://pagaralamkota.bps.go.id

LAMPIRAN

https://pagaralamkota.bps.go.id

Lampiran 1.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Pagar Alam, 2017-2021

(juta rupiah)

KOMPONEN	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	1 878 739	2 040 608	2 197 798	2 258 357	2 304 098
1.a Makanan, Minuman, dan Rokok	1 122 583	1 214 507	1 304 071	1 353 464	1 371 581
1.b Pakaian dan Alas Kaki	57 799	64 661	70 700	71 627	72 964
1.c Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	248 248	271 592	294 656	296 236	300 923
1.d Kesehatandan Pendidikan	150 720	162 556	173 937	181 610	190 887
1.e Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	203 561	217 910	231 144	232 121	239 067
1.f Hotel dan Restoran	39 867	45 610	53 681	49 695	51 800
1.g Lainnya	55 961	63 771	69 609	73 606	76 875
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	47 122	52 981	59 503	55 103	57 494
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	450 872	478 463	518 937	474 340	493 696
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4a + 4b)	1 035 287	1 078 320	1 055 121	1 082 886	1 089 860
4.a Bangunan	745 475	790 785	781 246	793 318	813 242
4.b Non-Bangunan	289 812	287 535	273 875	289 549	276 618
5. Perubahan Inventori	146 769	290 823	- 21 338	- 31 055	12 096
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-1 010 270	-1 267 901	-1 018 404	-1 009 253	-951 294
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	**2 548 520**	**2 673 294**	**2 791 616**	**2 830 358**	**3 005 950**

https://pagaralamkota.bps.go.id

** Angka Sementara*
*** Angka Sangat Sementara*

Lampiran 2.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran, Kota Pagar Alam, 2017-2021

(juta rupiah)

KOMPONEN	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1 232 196	1 283 668	1 350 533	1 354 418	1 373 539
1.a Makanan, Minuman, dan Rokok	713 551	744 576	789 033	791 053	798 740
1.b Pakaiandan Alas Kaki	43 455	45 122	48 325	48 247	48 454
1.c Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan RumahTangga	161 966	166 116	173 692	174 133	174 904
1.d Kesehatan dan Pendidikan	101 419	106 116	110 890	113 859	117 298
1.e Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	144 462	150 231	153 990	153 586	157 848
1.f Hotel dan Restoran	26 362	28 001	30 150	27 998	29 082
1.g Lainnya	40 979	43 507	44 453	45 541	47 212
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	34 659	37 350	40 171	37 444	37 964
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	319 246	318 643	331 181	298 030	303 841
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4 a + 4 b)	834 394	849 300	841 810	857 524	844 021
4.a Bangunan	594 464	610 364	616 566	622 167	625 962
4.b Non-Bangunan	239 930	238 936	225 245	235 358	218 059
5. Perubahan Inventori	93 828	282 469	- 19 217	-23 242	8 936
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	- 442 880	- 613 340	- 310 710	- 289 908	- 235 854
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	**2 071 443**	**2 158 092**	**2 233 768**	**2 234 267**	**2 332 447**

** Angka Sementara*
*** Angka Sangat Sementara*

https://pagaralamkota.bps.go.id

Lampiran 3.

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Pagar Alam, 2017-2021

(persen)

KOMPONEN	2017	2018	2019	2020*	2021**
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	73,72	76,33	78,73	79,79	76,65
1.a Makanan, Minuman, dan Rokok	44,05	45,43	46,71	47,82	45,63
1.b Pakaian dan Alas Kaki	2,27	2,42	2,53	2,53	2,43
1.c Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan RumahTangga	9,74	10,16	10,56	10,47	10,01
1.d Kesehatan dan Pendidikan	5,91	6,08	6,23	6,42	6,35
1.e Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	7,99	8,15	8,28	8,20	7,95
1.f Hotel dan Restoran	1,56	1,71	1,92	1,76	1,72
1.g Lainnya	2,20	2,39	2,49	2,60	2,56
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,85	1,98	2,13	1,95	1,91
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	17,69	17,90	18,59	16,76	16,42
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4 a + 4 b)	40,62	40,34	37,8	38,26	36,26
4.a Bangunan	29,25	29,58	27,99	28,03	27,05
4.b Non-Bangunan	11,37	10,76	9,81	10,23	9,20
5. Perubahan Inventori	5,76	10,88	-0,76	-1,10	0,40
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-39,64	-47,43	-36,48	-35,66	-31,65
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

https://pagaralamkota.bps.go.id

* *Angka Sementara*
** *Angka Sangat Sementara*

Lampiran 4.

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran, Kota Pagar Alam, 2017-2021

(persen)

KOMPONEN	2017	2018	2019	2020*	2021**
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,63	4,18	5,21	0,29	1,41
1.a Makanan, Minuman, dan Rokok	4,03	4,35	5,97	0,26	0,97
1.b Pakaian dan Alas Kaki	2,20	3,84	7,10	-0,16	0,43
1.c Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan RumahTangga	2,46	2,56	4,56	0,25	0,44
1.d Kesehatan dan Pendidikan	3,90	4,63	4,50	2,68	3,02
1.e Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	3,32	3,99	2,50	-0,26	2,77
1.f Hotel dan Restoran	5,34	6,22	7,68	-7,14	3,87
1.g Lainnya	2,10	6,17	2,17	2,45	3,67
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3,20	7,77	7,55	-6,79	1,39
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-0,71	-0,19	3,93	-10,01	1,95
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4a + 4b)	2,32	1,79	-0,88	1,87	-1,57
4.a Bangunan	2,82	2,67	1,02	0,91	0,61
4.b Non-Bangunan	1,10	-0,41	-5,73	4,49	-7,35
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
PDRB	**4,81**	**4,18**	**3,51**	**0,02**	**4,39**

https://pagaralamkota.bps.go.id

* *Angka Sementara*
** *Angka Sangat Sementara*

Lampiran 5

Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran (2010 = 100), Kota Pagar Alam, 2017-2021

(persen)

KOMPONEN	2017	2018	2019	2020*	2021**
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	152,47	158,97	162,74	166,74	167,75
1.a Makanan, Minuman, dan Rokok	157,32	163,11	165,27	171,10	171,72
1.b Pakaian dan Alas Kaki	133,01	143,30	146,30	148,46	150,58
1.c Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan RumahTangga	153,27	163,50	169,64	170,12	172,05
1.d Kesehatan dan Pendidikan	148,61	153,19	156,86	159,50	162,74
1.e Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	140,91	145,05	150,1	151,13	151,45
1.f Hotel dan Restoran	151,32	162,89	178,04	177,49	178,12
1.g Lainnya	136,56	146,58	156,59	161,63	162,83
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	135,96	141,85	148,12	147,16	151,44
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	141,23	150,16	156,69	159,16	162,48
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4 a + 4 b)	124,08	126,97	125,34	126,28	129,13
4.a Bangunan	125,40	129,56	126,71	127,51	129,92
4.b Non-Bangunan	120,79	120,34	121,59	123,02	126,85
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
PDRB	**123,03**	123,87	124,97	126,68	128,88

** Angka Sementara*
*** Angka Sangat Sementara*

https://pagaralamkota.bps.go.id

Lampiran 6.

Laju Pertumbuhan Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran (2010 = 100), Kota Pagar Alam, 2017-2021

(persen)

KOMPONEN	2017	2018	2019	2020*	2021**
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,39	4,26	2,37	2,46	0,61
1.a Makanan, Minuman, dan Rokok	5,87	3,68	1,32	3,52	0,36
1.b Pakaian dan Alas Kaki	3,56	7,74	2,09	1,48	1,43
1.c Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan RumahTangga	4,76	6,67	3,76	0,28	1,13
1.d Kesehatan dan Pendidikan	3,57	3,08	2,39	1,69	2,03
1.e Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	5,19	2,94	3,48	0,69	0,21
1.f Hotel dan Restoran	4,34	7,71	9,30	-0,31	0,35
1.g Lainnya	6,29	7,34	6,83	3,22	0,74
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,15	4,33	4,43	-0,65	2,91
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6,94	6,32	4,35	1,57	2,09
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4 a + 4 b)	-0,10	2,33	-1,28	0,75	2,26
4.a Bangunan	-0,30	3,31	-2,20	0,63	1,89
4.b Non-Bangunan	0,36	-0,37	1,04	1,18	3,11
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
PDRB	**0,71**	**0,68**	**0,86**	**1,37**	**1,73**

https://pagaralamkota.bps.go.id

* *Angka Sementara*
** *Angka Sangat Sementara*

DAFTAR PUSTAKA

https://pagaralamkota.bps.go.id

1. Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
2. _____, *Incremental Capital Output Ratio Sektor Industri*, 1980-1990. Jakarta.
3. _____,*Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
4. _____,*Statistik Industri, berbagai seri*, Jakarta.
5. _____,*Statistik Listrik, Gas dan Air,* berbagai seri, Jakarta.
6. _____,*Statistik Pertambangan Migas*, berbagai seri, Jakarta.
7. _____,*Statistik Pertambangan Non Migas,* berbagai seri, Jakarta.
8. _____,*Statistik Konstruksi,* berbagai seri, Jakarta.
9. _____,*Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
10. _____,*Statistik Keuangan BUMN dan BUMD*, 1997, Jakarta 2000.
11. , *Profil Ekonomi Rumahtangga 1998*, Jakarta 1999.
12. Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.
13. Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series. No. 29. Washington DC. 1979.
14. Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.
15. United Nations, *A System of National Accounts*, Studies in Methods, Series F No.2 Rev.3. New York, 1968.
16. , *Input-Output Table and Analysis*. Studies in Methods.Series F No. 14 Rev 1. New York. 1973.
17. _____,*Handbook of National Accounting for Production*, Sources and Methods, Series F No. 39, New York, 1986.

https://pagaralamkota.bps.go.id

18. , *Handbook of National Accounting*, Public Sector Accounts, Studies Methods, Series F No. 50. New York, 1988.
19. , *Link between Business Accounting and National Accounting*, Public Sector Accounts, Studies Methods, Series F No. 76. New York, 2000.
20. Verbiest Piet, *Investment Matrix*, HasilKerjasama Asian Development Bank denganBadanPusatStatistik, Jakarta, 1997.
21. Ward. Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.
22. World Bank, *System of National Accounts 1993*, BahanKursus, Washington DC. 1993

https://pagaralamkota.bps.go.id

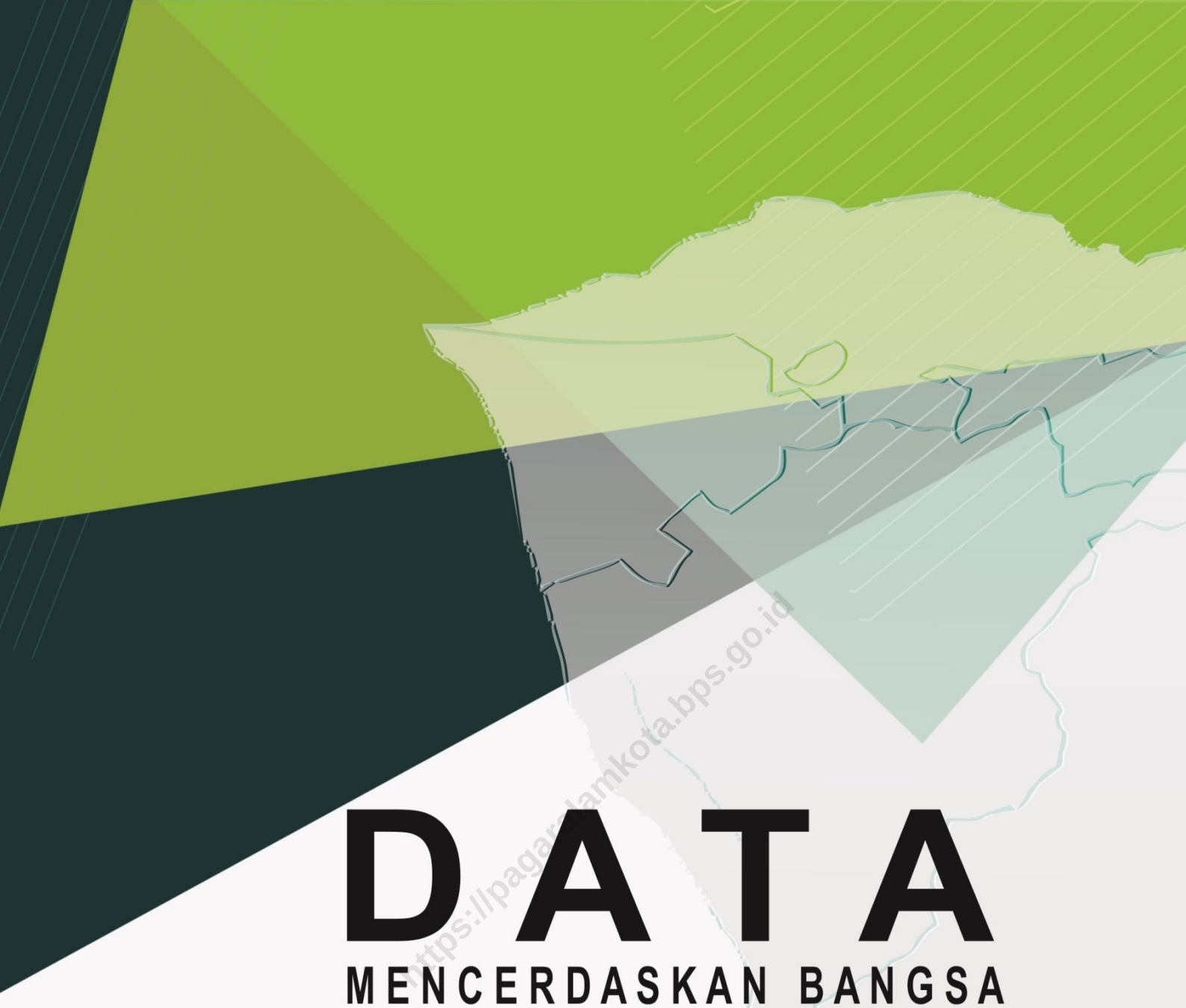

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

Enlighten The Nation

https://pagaralamkota.bps.go.id

BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PAGAR ALAM

Jl. Laskar Wanita Mentarjo

Komplek Perkantoran Gunung Gare

Kota Pagar Alam Telp./Fax No. : 0730 623511

Email: bps1673@bps.go.id

9 772598 555002